

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalam kabupaten/kota penghitung Indek Harga Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkan pada hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan setiap hari. Terdapat 5 (lima) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-masing :

1. Pasar Niaga Bersujud kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bumi Pangeran Kecamatan Kusan Hilir
3. Pasar Nusa Indah Kecamatan Angsana
4. Pasar Sudan Raya Kecamatan Satui
5. Pasar Batulicin Kecamatan Batulicin

Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan I Tahun 2025 cenderung mengalami penurunan dari awal Triwulan sampai akhir Triwulan II. Angka IPH di bulan April berada pada posisi 0,13 kemudian agak menurun sedikit di bulan Mei di angka 0,09 dan kembali turun di bulan Juni hingga mencapai -0,14.

Secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan II tahun 2025 mayoritas cenderung stabil. Hanya terdapat beberapa komoditas yang mengalami fluktuatif, dan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan serta penurunan secara terus menerus.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Adalah **Cabai Merah Keriting** yang pada bulan April memiliki harga rata-rata Rp. 68.750,-, naik di bulan Mei menjadi Rp. 70.000,- dan turun kembali di akhir Juni menjadi Rp. 68.889,-. Sementara untuk **Cabai Merah Besar** yang pada bulan April memiliki harga rata-rata Rp. 61.250,-, naik di bulan Mei menjadi Rp. 65.000,-, dan turun pada Juni menjadi Rp. 63.889,-. **Telur Ayam Ras** pada bulan April memiliki harga rata-rata Rp. 30.000,-, naik di bulan Mei menjadi Rp. 30.500,- dan turun kembali di akhir Juni menjadi Rp. 29.661,-.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terus menerus selama triwulan II adalah **Cabai Rawit Merah** yang pada bulan April dan Mei identik memiliki harga rata-rata Rp. 50.000,-, dan naik di bulan Juni menjadi Rp. 54.815,-. **Cabai Rawit Hijau** yang pada bulan April dan Mei memiliki harga rata-rata identik di angka Rp. 45.000,-, naik di bulan Juni pada titik harga Rp. 46.852,-. **Bawang Merah** yang pada bulan April dan Mei memiliki harga rata-rata Rp. 33.000,-, mengalami kenaikan cukup drastis di bulan Juni menjadi Rp. 45.963,-.

Komoditas yang mengalami penurunan terus menerus selama triwulan II adalah **Daging Ayam Ras** yang pada bulan April memiliki harga rata-rata Rp. 33.667,-, turun di bulan Mei menjadi Rp. 33.375,-, dan turun lagi menjadi Rp. 31.889,- di bulan Juni.

Sementara kondisi harga yang cenderung stabil selama Triwulan II 2025 ini adalah **Beras Premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 16.000,-, **Beras Medium** di harga Rp. 12.667,-, **Gula pasir** di harga rata-rata Rp. 20.000,-, **Minyak goreng kemasan premium** yang

memiliki harga rata-rata Rp. 18.000,-, **Daging Sapi** di harga Rp.160.000,-, **Mie Instant** di harga rata-rata Rp. 3.000,-, **Tomat** di harga Rp.18.000,-, **Susu Bubuk Balita** di harga rata-rata Rp. 42.900,-, dan **Bawang Putih Honan** di harga rata-rata Rp. 40.000,-

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan II Tahun 2025 ini cukup stabil dan bahkan cenderung menurun. Ini menunjukkan adanya keseimbangan pasokan dan permintaan terhadap bahan pangan pokok. Namun kondisi ini tentu saja harus terus dijaga karena kondisi kesenjangan antara pasokan dan permintaan seringkali bisa terjadi sewaktu-waktu.

Beberapa permasalahan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian inflasi diantaranya :

1. Pada tahap awal tidak cukup data dan informasi yang tersedia pada rantai pasok bagian mana perubahan dan kenaikan harga terjadi.
2. Belum tersedianya data yang memadai tentang kesenjangan antara produksi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting dengan kebutuhan konsumsi masyarakat per hari
3. Intervensi dan upaya pengendalian inflasi tidak dilakukan secara berkelanjutan, perubahan penurunan harga hanya bersifat sementara.
4. Upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan melalui kegiatan penanaman dan produksi khususnya tanaman pangan dan hortikultura diperlukan cukup waktu sehingga tidak dapat mengatasi kebutuhan dalam jangka pendek.
5. Produksi beberapa kebutuhan bahan pokok dan penting terutama komoditas hortikultura didalam daerah masih terbatas sehingga cukup tergantung pasokan dari daerah lain.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan II ini adalah pelaksanaan sidak dan monitoring harga bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional dan gudang distributor bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2025 . Kegiatan ini dilaksanakan bersama anggota TPID dan Satgas Pangan Kabupaten Tanah Bumbu dengan hasil kondisi yang didapat dimana harga bahan pangan pokok di pasar yang cenderung stabil meskipun memasuki menjelang Hari Besar Keagamaan.

Kabupaten Tanah Bumbu juga menjajaki kemungkinan melakukan Kerjasama Antar Daerah dengan daerah penghasil terutama untuk komoditas hortikultura seperti Cabai Rawit, Bawang dan beberapa komoditas lainnya yang harganya sangat fluktuatif karena masih besarnya ketergantungan Kabupaten Tanah Bumbu terhadap pasokan dari daerah luar. Kegiatan ini ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2025.

Kebijakan lain yang telah dilaksanakan adalah program kios pangan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Harapannya agar masyarakat

menengah ke bawah bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu sebagai upaya membangun sinergi stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam kerangka menjaga inflasi pangan tetap terkendali.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu juga telah mengupayakan fasilitasi akses keuangan daerah dengan mendorong Lembaga keuangan dan perbankan untuk percepatan dan kemudahan penyaluran kredit terutama untuk usaha mikro dan menengah. Meski demikian hal ini belum menunjukkan hasil optimal mengingat daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban ke Lembaga keuangan dan perbankan juga mengalami penurunan.

Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan yang dilaksanakan oleh Bulog di semua Kecamatan juga dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran Bantuan diterima oleh semua penerima manfaat dan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat di desa dalam menghadapi tantangan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus menjadi salah satu Kebijakan Pengendalian Inflasi di desa terutama dalam hal mengendalikan harga dan permintaan terhadap komoditi beras di pasaran.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan seperti kegiatan Gerakan Pangan Murah belum sistematis dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat karena hanya dilaksanakan dengan frekuensi yang terbatas terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
2. Kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi belum terintegrasi dari hulu ke hilir, karena terfokus di sisi peningkatan produktifitas dan pada upaya respons saat terjadi kenaikan harga di pasar, namun sering mengabaikan stabilitas pasokan dan efisiensi rantai pasok.
3. Beberapa Kegiatan yang dapat diklaim sebagai inovasi Pengendalian Inflasi daerah seperti program penanaman padi apung yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum dirasakan optimal karena masih dalam tahap percobaan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan pengendalian harga menghadapi HBKN melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah disetiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pengendalian inflasi dikabupaten/kota perlu dilaksanakan secara terpadu dan tidak parsial, dengan lebih mendorong dan memperkuat tugas-tugas TPID kabupaten/kota yang disertai anggaran yang memadai.
3. Perlu melakukan identifikasi rantai pasok kebutuhan bahan pokok dan penting yang terbatas atau tidak dapat dipenuhi oleh daerah, dan ditindak lanjuti dengan Kerjasama dengan daerah penghasil, baik Kerjasama antar daerah maupun Kerjasama antar pelaku usaha.
4. Melakukan penguatan data dan informasi terkait produksi dan ketersediaan bahan pangan serta kebutuhan konsumsi masyarakat per hari setiap periodenya melalui optimalisasi Neraca Pangan
5. Memastikan distribusi bahan baku berjalan dengan lancar dan terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk belanja secara bijak.